

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum Daerah

Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, dirumuskan kebijakan umum dan program-program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran yang direncanakan untuk lima tahun ke depan.

Perumusan kebijakan umum dan program-program prioritas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Merumuskan kebijakan umum yang akan dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, secara garis besar terdapat empat hal yang diperhatikan, yaitu (1) Kebijakan dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan; (2) Operasionalisasi aparatur dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai; (3) Upaya-upaya yang mengungkit/mendorong kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan sumber daya manusia, sistem dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah; dan (4) upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan Daerah.

Lebih spesifik, kebijakan umum Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 diarahkan untuk:

1. Melaksanakan program unggulan yang menjadi tema utama (*dedicated*) pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021;
2. Melaksanakan program-program dalam mendukung pencapaian target Nasional (SDGs, dan Nawacita serta Common Goal Jawa Barat);

3. Penanganan bencana secara terpadu dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mengutamakan mitigasi bencana serta peningkatan kerjasama lintas SKPD;
4. Melaksanakan optimalisasi penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
5. Mengembangkan industri kreatif pariwisata berbasis event (ekonomi, olahraga, seni dan budaya) dan berbasis alam, serta Desa Wisata
6. Fasilitasi pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan; dan
7. Mewujudkan desa yang maju, sejahtera dan demokratis melalui paradigma Desa membangun dan membangun Desa (Gerbang Desa).

7.2. Kebijakan Kewilayahan

Kebijakan kewilayahan adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, oleh karena itu kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Tasikmalaya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

1. pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian;
2. pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
3. pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
4. pengembangan sistem perkotaan – perdesaan;
5. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
6. optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang;
7. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan pembangunan berkelanjutan; dan
8. peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan.

Kebijakan kewilayahan untuk 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah melalui kebijakan:

1. melakukan revisi terhadap dokumen RTRTW untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah dan masyarakat.
2. meningkatkan konektivitas antar wilayah dan antar daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten dan Kota lain.
3. meningkatkan pembangunan infrastruktur strategis dan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Khusus untuk mewujudkan kawasan strategis pusat pemerintahan ibukota kabupaten dan menunjang pertumbuhan, perkembangan serta memperkuat dan memperlancar mobilitas, aksesibilitas pergerakan orang maupun barang dari dan ke wilayah Ibukota, direncanakan beberapa prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2016-2021 meliputi kegiatan :

1. Pembuatan Bangunan Pelengkap Jalan
2. Penuntasan Pembangunan Gedung Kantor
3. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/Taman
4. Pembangunan Utilitas
 - a. Jaringan Air Bersih
 - b. Jaringan Listrik
 - c. Jaringan Telepon
 - d. Jaringan drainase perkotaan
 - e. Jaringan teknologi komunikasi dan informasi

7.3. Kebijakan Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tasikmalaya dalam lima tahun ke depan, maka kebijakan pendanaan pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan anggaran berorientasikan pada program-program upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia, melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan bidang penunjang lain, dengan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dasar pemerintah daerah seperti belanja gaji serta belanja tetap.

2. Mengimplementasikan amanat konstitusi dan kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah seperti prioritas bidang pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dan bidang kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen) secara bertahap.
3. Alokasi belanja langsung diprioritaskan untuk program Tasik SIAP.
4. Konsistensi pengembangan agribisnis melalui alokasi belanja langsung untuk bidang agribisnis dan pariwisata
5. Pengembangan aktivitas ekonomi dan agribisnis, maka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, pengairan dan listrik, akan diarahkan pada sentra-sentra produksi di pedesaan. Proporsi belanja langsung untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ini sebesar minimal 18 % dari total belanja langsung.
6. Memberikan perhatian khusus kepada 10 kecamatan yang mempunyai nilai IPM terendah untuk memperoleh prioritas pendanaan atau program pembangunan.

7.4. Program Prioritas Bupati: TASIK SIAP

Pada fase ketiga pencapaian RPJPD Tahun 2005-2025 yang sarasannya menjadikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah yang berdaya saing, maka Bupati dan Wakil Bupati mengusung program prioritas yang dikemas dalam jargon TASIK SIAP. TASIK SIAP mengandung spirit kesiapan kepemimpinan dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan terpenuhinya kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat dan dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. TASIK SIAP terdiri atas:

1. SIAP 1: Memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar.
2. SIAP 2: Menjadikan sumberdaya manusia berahlaq dan berkualitas.
3. SIAP 3: Berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif.
4. SIAP 4: Mendayagunakan teknologi informasi.
5. SIAP 5: Menjamin kemudahan investasi.

7.5. Program Pembangunan Daerah

Selain program prioritas TASIK SIAP, secara lebih detail untuk pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, mengusung beberapa program pembangunan daerah berdasarkan urusan daerah yang dikelompokkan berdasarkan misi. Program pembangunan daerah tersebut sebagaimana dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1.

Program Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021

Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah dan Berkualitas.

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
1	Peningkatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menanamkan nilai empati dan kepedulian sosial	1. Program Peningkatan Kepedulian sosial dan peran Lembaga Keagamaan 2. Program Peningkatan Kepedulian sosial dan peran Lembaga Keagamaan	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
2	Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pelayanan keagamaan	1. Program Peningkatan Kepedulian sosial dan peran Lembaga Keagamaan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	
3	Penyelenggaraan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menengah	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Urusan Pendidikan
4	Peningkatan jumlah sekolah terakreditasi dan nilai akreditasi sekolah	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	
5	Penyelenggaraan PAUD dan PLS	Program pendidikan anak usia dini	
6	Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Program peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan	
7	Penyediaan bantuan anggaran untuk peserta didik kurang mampu dan berprestasi	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
8	Peningterasian dan pengembangan pendidikan inklusif	1. Program pendidikan inklusif 2. Program pendidikan luar biasa	Urusan Pendidikan
9	Penyelenggaraan event dan pengeiriman delegasi siswa dalam setiap kompetisi	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	
10	Penyediaan perpustakaan dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis Teknologi Informasi	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Urusan Perpustakaan
11	Peningkatan pola hidup sehat dan kesadaran terhadap pemenuhan gizi	Program perbaikan gizi masyarakat	Urusan Kesehatan
12	Pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
13	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana, tenaga medis dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	1. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3. Program obat dan perbekalan kesehatan 4. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
14	Peningkatan anggaran dan cakupan penerima jaminan kesehatan masyarakat miskin	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
15	Peningkatan mutu manajemen pelayanan, regulasi dan Teknologi Informasi kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 	Urusan Kesehatan
16	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, mendekatkan jarak layanan, peningkatan kesadaran ibu hamil, melahirkan dan masyarakat resiko tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 3. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 4. Program pelayanan kesehatan lanjut usia 	
17	Peningkatan kepesertaan KB dan kualitas Peserta KB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program KB 2. Program pelayanan kontrasepsi 3. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
18	Pemerataan wilayah pertumbuhan pembangunan, pengendalian urbanisasi dan pendidikan transmigrasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 2. Program Transmigrasi Lokal 3. Program Transmigrasi Regional 	Urusan Transmigrasi
19	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis Teknologi Informasi	Program penataan administrasi kependudukan	Urusan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20	Peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan lembaga publik, peningkatan kesadaran kesetaraan gender dalam pembangunan dan perlindungan terhadap anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3. Program peningkatan kualitas hidup dan 	Urusan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
		perlindungan perempuan 4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 5. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	
21	Peningkatan pemberdayaan dan cakupan penanganan PMKS	1. Program pemberdayana fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan PMKS 2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 3. Program pembinaan anak terlantar 4. Program pembinaan eks penyakit sosial 5. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 6. Program Keluarga Harapan	Urusan sosial
22	Peningkatan kompetensi dan daya saing, informasi dan akses ketenagakerjaan, peningkatan pelayanan ketenagakerjaan dan perlindungan serta pengawasan ketenagakerjaan	1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 2. Program peningkatan kesempatan kerja 3. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Urusan tenaga kerja
23	Peningkatan keterlibatan pemuda, kompetensi pemuda dan pemberdayaan OKP	1. Program peningkatan peran serta kepemudaan 2. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Urusan pemuda dan olahraga

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
24	Peningkatan sarana dan prasarana, pembiayaan dan pembinaan prestasi olah raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga 	
25	Pengembangan event kebudayaan yang terintegrasi dengan wisata, pengembangan nilai dan pelestarian budaya lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan nilai budaya 2. Program pengelolaan kekayaan budaya 3. Program pengelolaan keragaman budaya 4. Program pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya 	Urusan kebudayaan
26	Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 2. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 	Urusan sosial
27	Peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan akses permodalan bagi RTS	Program koordinasi penanggulangan kemiskinan	Urusan Sosial

Misi Kedua : Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
1	Peningkatan akses permodalan, sarana dan prasarana pertanian, kompetensi petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kesejahteraan petani 2. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 3. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan 	Urusan pertanian
2	Peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan, perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 	Urusan pertanian

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
		2. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 4. Program peningkatan produksi hasil peternakan 5. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 6. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 7. Program pengembangan budidaya perikanan 8. Program pengembangan perikanan tangkap	Urusan Kelautan dan Perikanan
3	Peningkatan kompetensi dan keterampilan pelaku ekonomi serta kemitraan antar pelaku usaha	1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Urusan Koperasi dan KUKM
4	Penguatan jejaring antara pelaku dan lembaga perekonomian	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Urusan Koperasi dan KUKM
5	Peningkatan daya saing dan investasi daerah	1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Urusan penanaman modal
6	Peningkatan profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM.	1. Program penciptaan iklim usaha kecil yang kondusif 2. Program kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Urusan Koperasi dan KUKM

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
		3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	
7	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan pembinaan pedagang	1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Urusan perdagangan
8	Peningkatan peran sektor industri yang mendukung pertanian	1. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2. Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi 3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 4. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Urusan industri
9	Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD	1. Program penyertaan modal 2. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Urusan penanaman modal
10	Meningkatkan kawasan pusat pertumbuhan perekonomian baru	Pengembangan wilayah/kawasan pertumbuhan perekonomian	Aspek Perencanaan
11	Pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan pertanian dan perdesaan	1. Program pengembangan Desa Wisata 2. Program pengembangan destinasi pariwisata 3. Program pengembangan kemitraan	Urusan pariwisata

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
		4. Program pengembangan pemasaran pariwisata	
12	Peningkatan ketersediaan, keragaman dan keamanan pangan	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Urusan pangan

Misi Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
1	Penataan kelembagaan OPD berdasarkan kewenangan dan kebutuhan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penataan OPD 2. Program penataan ketatalaksanaan 3. Program peningkatan pelayanan publik 4. Program peningkatan kinerja perangkat daerah 5. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD 6. Pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan pembangunan daerah 7. Program peningkatan sistem pelaporan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah 	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
2	Penataan prosedur dan produk hukum daerah	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
3	Peningkatan kapasitas, fungsi dan peran DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2. Program pengawasan 	SKPD yang menangani Kesekretariatan DPRD
4	Penguatan kerjasama, kemitraan dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya serta pengembangan daerah otonom baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 2. Program penataan daerah otonom baru 	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
5	Peningkatan pengelolaan dan penyelamatan dokumen/arsip daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peneraparan e-digitalisasi arsip 2. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 3. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 4. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 5. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 	Urusan kearsipan
6	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembangunan kantor pemerintah 2. Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintah 	SKPD yang menangani Kesekretariatan Daerah
7	Pendayagunaan teknologi informasi dan peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 2. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 3. Program kerjasama informasi dan media massa 4. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 5. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 	Urusan Komunikasi Dan Informatika
8	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan IPTEK sebagai bahan masukan kebijakan	Program Pengkajian Penggalan Pembangunan Khazanah Potensi Daerah	SKPD yang menangani Penelitian dan Pengembangan

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
9	Peningkatan proses partisipasi dan kualitas perencanaan daerah serta publikasi perencanaan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program perencanaan pembangunan daerah 2. Program Kerjasama Pembangunan 	Aspek perencanaan
10	Peningkatan tata kelola keuangan dan pemanfaatan aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2. Program peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah 3. Program optimalisasi pengelolaan aset daerah 4. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 	SKPD yang menangani Keuangan
11	Peningkatan kompetensi, kesejahteraan dan etika aparatur pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 2. Program Pendidikan Kedinasan 3. Program pembinaan aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 	SKPD yang menangani Kepegawaian
12	Pencegahan KKN melalui efektivitas pengawasan internal, penguatan sistem dan kultur aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 4. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi informasi 	SKPD yang menangani Pengawasan

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
		5. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD 6. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	
13	Peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	1. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 2. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
14	Peningkatan pendidikan dan partisipasi politik masyarakat serta wawasan kebangsaan yang selaras dengan nilai keagamaan dan budaya	1. Program pengembangan wawasan kebangsaan 2. Program pendidikan politik masyarakat	
15	Perbaikan tata kelola, peningkatan pelayanan desa	1. Program pengembangan ekonomi perdesaan 2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 3. Program peningkatan kapasitas aparaturng desa 4. Program peningkatan kerjasama antar desa dan pemberdayaan BKAD 5. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 7. Program peningkatan kerjasama antar desa dan pemberdayaan BKAD	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
16	Penyelenggaraan Kabupaten Tasikmalaya Satu Data	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Urusan statistik

Misi Keempat : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
1	Peningkatan jaringan irigasi, sumber daya air, dan perhubungan serta penerangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembangunan jalan dan jembatan 2. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya 3. Program pengembangan&pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 5. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 6. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 7. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 	Urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang
2	Peningkatan ketersediaan PSU Perumahan dan permukiman perkotaan dan perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan perumahan 2. Program lingkungan sehat perumahan 	Urusan perumahan rakyat dan permukiman
3	Perwujudan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang konsisten dan terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program perencanaan tata ruang 2. Program pemanfaatan tata ruang 3. Program pengendalian pemanfaatan ruang 	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

No.	Strategi	Program Prioritas	SKPD Penanggungjawab Urusan
4	Peningkatan pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana	Program tanggap dan penanggulangan bencana	Urusan sosial
5	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 3. Program perlindungan dan konservasi SDA 4. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH 5. Program peningkatan pengendalian polusi 6. Program pengelolaan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 	Urusan Lingkungan Hidup